



LAPORAN KINERJA PEJABAT DAN STAF

DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nyam sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit di Dinas Sosial Kabupaten Jember kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2023.

JEMBER, JANUARI 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER

AKHMAD HELMI LUOMAN, S.Sos

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760507 199602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN	7
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER.....	7
D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER	12
E. ISU STRATEGIS	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023	17
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	27
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023	29
B. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER	30
C. REALISASI ANGGARAN	53
BAB IV PENUTUP	57
A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA.....	57
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN	57

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2023.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya. Capaian Kinerja SASARAN Tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU ATAU Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan pemberdayaan sosial

Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS

Sasaran 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 (empat) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Disamping capaian kinerja yang sangat memuaskan, disamping perbaikan tata kelola dan penerapan pelayanan publiknya, Dinas Sosial berhasil mendapatkan penghargaan "Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023" dengan nilai A dan kategori "Pelayanan Prima", dan penghargaan- penghargaan lain yang diterima antara lain : Juara 1 (satu) Pimpinan Informatif, Juara 2 (dua) PPID Pelaksana Informatif dan Juara Favorit RTIK.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 97.38 % merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp. 59.383.688.376,- dan Belanja Modal sebesar 2,62 % atau sebesar Rp. 1.595.457.000,-.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 54.326.348.943,- atau 89 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan bahwa ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan anggaran tidak terserap 100 %, dikarenakan ada beberapa kegiatan yang mengalami kendala adminidtrasi dan teknis (ada kegiatan yang anggarannya tidak terserap dan digeser/dialihkan untuk kegiatan lainnya).

Kendala atau hambatan yang dialami dalam pelaporan dan pengukuran target – target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain :

- 1). Permasalahan pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial:
 - Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan pemberdayaan sosial
 - Kemampuan dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang perlu ditingkatkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial
- 2). Permasalahan pada sasaran Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - Data calon penerima bantuan masih belum akurat
 - Belum terlaksananya kegiatan yang mendorong kemandirian dan produktifitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3). Permasalahan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Restorasi Sosial
 - Kemampuan dan kualitas SDM Non ASN penjaga 15 Taman Makam Pahlawan yang perlu ditingkatkan
 - Minimnya Anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan 15 Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Jember
- 4). Permasalahan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

- Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan baik itu rutin maupun program kegiatan prioritas yaitu bantuan dan pelayan sosial bagi PMKS;
- Perencanaan kegiatan yang masih belum optimal khususnya untuk bantuan dan pelayanan sosial bagi PMKS.

Dan rencana aksi Dinas Sosial Kabupaten Jember atas semua kendala/permasalahan diatas adalah :

- Mengadakan Bimtek/Pelatihan khusus bagi peningkatan SDM PSKS agar lebih optimal dalam membantu penanganan PMKS ;
- Mengadakan Bimtek bagi peningkatan SDM Karyawan ASN dan Non ASN Dinas Sosial Kabupaten Jember agar lebih optimal dan memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan sosial pada PMKS ;
- Peningkatan verifikasi dan verifikasi DTKS di 31 Kecamatan ;
- Peningkatan Assesmen calon penerima manfaat dengan turun langsung ke wilayah/door to door;
- Menyusun program kegiatan pelatihan ketrampilan bagi PMKS guna mewujudkan kemandirian PMKS
- Sinergi dengan Stakeholder/OPD terkait agar ikut berperan dalam usaha pemberdayaan guna kemandirian PMKS
- Pengajuan tambahan anggaran pemeliharaan 15 TMP di Kabupaten Jember Menyusun agenda kerja proses perencanaan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan kegiatan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV ; dan
- Manajemen anggaran pada TW I s/d IV (monitoring dan evaluasi) juga harus lebih dioptimalkan agar pada tahun yang akan datang realisasi anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : IX/MPR/1998 tentang Pencabutan GBHN disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten dikur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Jember

- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 sebagaiberikut :

- (1). Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Sosial
 - (2). Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
 - (3). Dinas Sosial Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial
 - (4). Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sosial;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
 - (5). Susunan Organisasi Dinas Sosial kabupaten Jember terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penanganan Bencana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- a). Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember** sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Sosial. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (3) sebagai berikut:
- 1). perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
 - 2). pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
 - 3). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
 - 4). pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial;dan

5). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pembantuan.

b). Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jember

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas ;
- 2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas
- 3). Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas; Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
- 4). Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

c). Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial : mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- 1). Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang meliputi penyediaan permakanan, sandang, alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan sosial pada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak, pemberian akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian pelayanan data dan pengaduan pemberian layanan kedaruratan, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, pemberian layanan rujukan.
- 2). Perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV atau AID dan NAPZA di luar panti sosial yang meliputi pemberian layanan data pengaduan, pemberian layanan kedaruratan, penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan diluar panti, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, pemberian bimbingan

sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas dasar, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, pemberian layanan rujukan, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten;

- 3). Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- 4). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial; dan
- 5). Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember

d) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- 1). perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemeliharaan anak-anak terlantar yang meliputi penjangkauan, rujukan dan pemantauan ;
- 2). perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten yang meliputi pendataan, pengelolaan fakir miskin cakupan daerah kabupaten, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat ;
- 3). Pelaksanaan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa atau kelurahan asalnya ;
- 4). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan perlindungan dan jaminan sosial; dan
- 5). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

e). Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas : merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial meliputi : kewirausahaan sosial, penyuluhan sosial, partisipasi sosial masyarakat, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan, rehabilitasi serta pengamanan sarana dan prasarana taman makam pahlawan kabupaten ;
- 2). Pelaksanaan kebijakan teknis sosial meliputi : kewirausahaan sosial, penyuluhan sosial, partisipasi sosial masyarakat, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan, rehabilitasi serta penanaman sarana

dan prasarana taman makam pahlawan kabupaten;

- 3). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial meliputi : kewirausahaan sosial, penyuluhan sosial, partisipasi sosial masyarakat, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan, rehabilitasi serta pengamanan sarana dan prasarana taman makam pahlawan, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d). Bidang Penanganan Bencana mempunyai tugas : merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanganan bencana alam dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penanganan Bencana mempunyai fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis penanganan bencana meliputi bencana alam, bencana sosial, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan LDP;
- 2). Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten yang meliputi koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana serta taruna siaga bencana; dan
- 3). Pemberian bimbingan teknis penanganan bencana meliputi bencana alam, bencana sosial, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan LDP.

e). UPT Liposos : mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas dalam urusan rumah tangga dibidang kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan Peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f). Kelompok Jabatan Fungsional : mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Kabupaten Jember sesuai dengan keahlian: (1) kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. (2) setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan

D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Jember terdiri dari 24 orang ASN dan 62 orang Non ASN, berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Jember :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Sosial berdasarkan Jabatan Periode Januari - Desember 2023

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris Dinas	1	
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1	
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1	
5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	
6.	Kepala Bidang Penanganan Bencana	1	
7.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	
9.	Perencana Ahli Muda	1	
10.	Pekerja Sosial Ahli Muda	8	
11.	Kepala UPT Liposos	1	
12.	Fungsional Umum	6	
Jumlah		24	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Dinas Sosial berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang Periode Januari- Desember 2023

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pembina TK I/ IVb	1	
2.	Pembina/ IVa	2	
3.	Penata Tingkat I/ IIIId	12	
4.	Penata/ IIIc	3	
5.	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	0	
6.	Penata Muda/ IIIa	0	
7.	Pengatur Tingkat I / IIId	3	
8.	Pengatur/ IIc	1	
9.	Pengatur Muda Tingkat I/ IIb	1	
10.	Pengatur Muda/ IIa	0	
11.	Juru Tingkat I/ Id	1	
12.	Juru/ Ic	0	
13.	Juru Muda Tingkat I/ Ib	0	
JUMLAH		24	

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Sosial berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Periode Januari- Desember 2023

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SD	1	ASN
2.	SLTP	0	
3.	SMA/STM	4	ASN
4.	D3	1	ASN
5.	S1	17	ASN
6.	S2	1	ASN
7	SD	0	
8.	SLTP	13	Non ASN
9.	SMA/STM	29	Non ASN
10.	D3	6	Non ASN
11.	S1	14	Non ASN
12.	S2	0	
	JUMLAH	86	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jember yaitu :

- 1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ; Upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS di Kabupaten Jember agar PMKS mengalami penurunan secara kuantitas, dan meningkat kemandirian dan kesejahteraanya
- 2) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ; Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila PSKS dan masyarakat diberdayakan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya, program pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.

- 3) Karena metode pemberdayaan tersebut memiliki sejumlah muatan indikator yang cukup mendukung dan dilengkapi dengan sudut pandang yang terarah. Dari keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya bangunan konstruksi kemandirian yang berkelanjutan dari masyarakat setempat
- 4) Potensi kemasyarakatan faktor lingkungan memberikan pengaruh positif terhadap upaya antara lain nilai kegotong-royongan, kesetiakawanan dan kepedulian sosial serta tersedianya sumber daya alam yang sebenarnya sangat potensial bila diolah dan dikembangkan guna memperluas sumber penghasilan bagi penyandang masalah. Untuk itu diperlukan upaya yang bersifat kreatif sehingga sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 3 (tiga) dan tujuan ke 1 (satu), yaitu :

- 1). Misi ke – tiga : Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semuawilayah
- 2). Tujuan ke – satu : Mengentaskan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar lainnya
- 3). Sasaran Strategis Kabupaten : Menurunnya Tingkat kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya,

yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026**

Matriks Sebelum Perubahan :

Tujuan 1 : Menurunnya Tingkat kemiskinan dan penyandang masalah sosial lainnya
Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya jumlah PMKS yang terlayani	Persentase PMKS yang terlayani	90.1 %	90.2 %	90.2 %	90.3 %	90.4 %	90.4 %
Meningkatnya layanan penanganan bencana	Prosentase PMKS yang menerima bantuan kebutuhan dasar	90.1 %	90.2 %	90.2 %	90.3 %	90.4 %	90.4 %
Meningkatnya pemeliharaan taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Matriks Sesudah Perubahan :

Tujuan 1 : Menurunnya Tingkat kemiskinan dan penyandang masalah sosial lainnya
Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya penanganan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Prosentase PMKS yang menerima bantuan kebutuhan dasar	90.1 %	90.2 %	90.2 %	90.3 %	90.4 %	90.4 %
Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian							

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember melalui program/kegiatan/sub kegiatan di Tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra perubahan Dinas Sosial Kabupaten Jember melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir :

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

MISI		TUJUAN RPJMD			INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD			INDIKATOR SASARAN			
Menuntaskan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Semua Wilayah		Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya			Persentase Penduduk Miskin	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya			Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Minimal			
TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	ANGGARAN (Rp).	
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya	Persentase Penurunan PMKS	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80%	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah PSKS yang Membantu Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada PMKS	1500 orang	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	1500 orang	989.243.000,-	
								Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	762.476.000,-	

		Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90.2 %	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	90,2%	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 orang	589.640.000,-
								Penyediaan Alat Bantu Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewangan Kabupaten/Kota	1000 orang	249.355.000,-
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	2.167.710.500,-
								Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penerima Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	462 orang	864.668.000,-

								Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	78.351.500,-
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000,- orang	1.675.462.000,-
								Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	67 Dokumen	264.960.000,-
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Skala yang Mmemperoleh Bnatuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	90,20%	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	254.642.500
								Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 orang	254.642.500,-
								Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	397.140 keluarga	906.632.000,-

								Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang Mendapat Bantuan Sosial Kesejahteraan	63.335 KPM	35.583.154.500,-
					Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat Bencana	90,20%	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	770 orang	3.489.250.000,-
		Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang Dirawat	15 TMP	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Tamakn Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	15 TMP	339.170.088,-
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Realisasi Anggaran	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	1 Dokumen	85.400.000,-
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	4.592.813.613,-

								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	75.194.500
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	231.547.600
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	119.932.300
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	1 Paket	320.290.000,-
								Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	93.247.607

								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	3.750.000,-
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400 Laporan	5.550.000
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	197.499.445,-
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yang disediakan	12 Laporan	4.159.758.000,-
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	181.765.500

								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	9 Unit	540.490.000
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	60.000.000
								Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	927.310.623

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tujuan OPD : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial
Indikator : Persentase PSKS yang Berdaya

Sasaran 2 : Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS
Indikator : Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar

Sasaran 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial
Indikator : Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program : Pemberdayaan Sosial
Indikator : Jumlah PSKS yang Membantu Pelayanan Penyelenggaraan

Program : Rehabilitasi Sosial
Indikator : PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial

Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator : PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Program : Penanganan Bencana
Indikator : Korban bencana yang menerima bantuan sosial

Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Indikator : Jumlah TMP yang Dirawat

Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota
Indikator : Persentase PSK yang dibina

Kegiatan : Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Indikator : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yang dijangkau

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/aids dan Napza di luar panti sosial
Indikator : Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/aids dan Napza di luar panti sosial

Kegiatan : Pemeliharaan anak-anak terlantar
Indikator : Persentase terpenuhinya pemberian bantuan kebutuhan dasar anak-anak terlantar dan anak PMKS lainnya

Kegiatan : Pengelolaan datab fakir miskin cakupan daerah kab/kota
Indikator :

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase tepenuhinya bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Indikator : Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara

Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanaan
Indikator : jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota

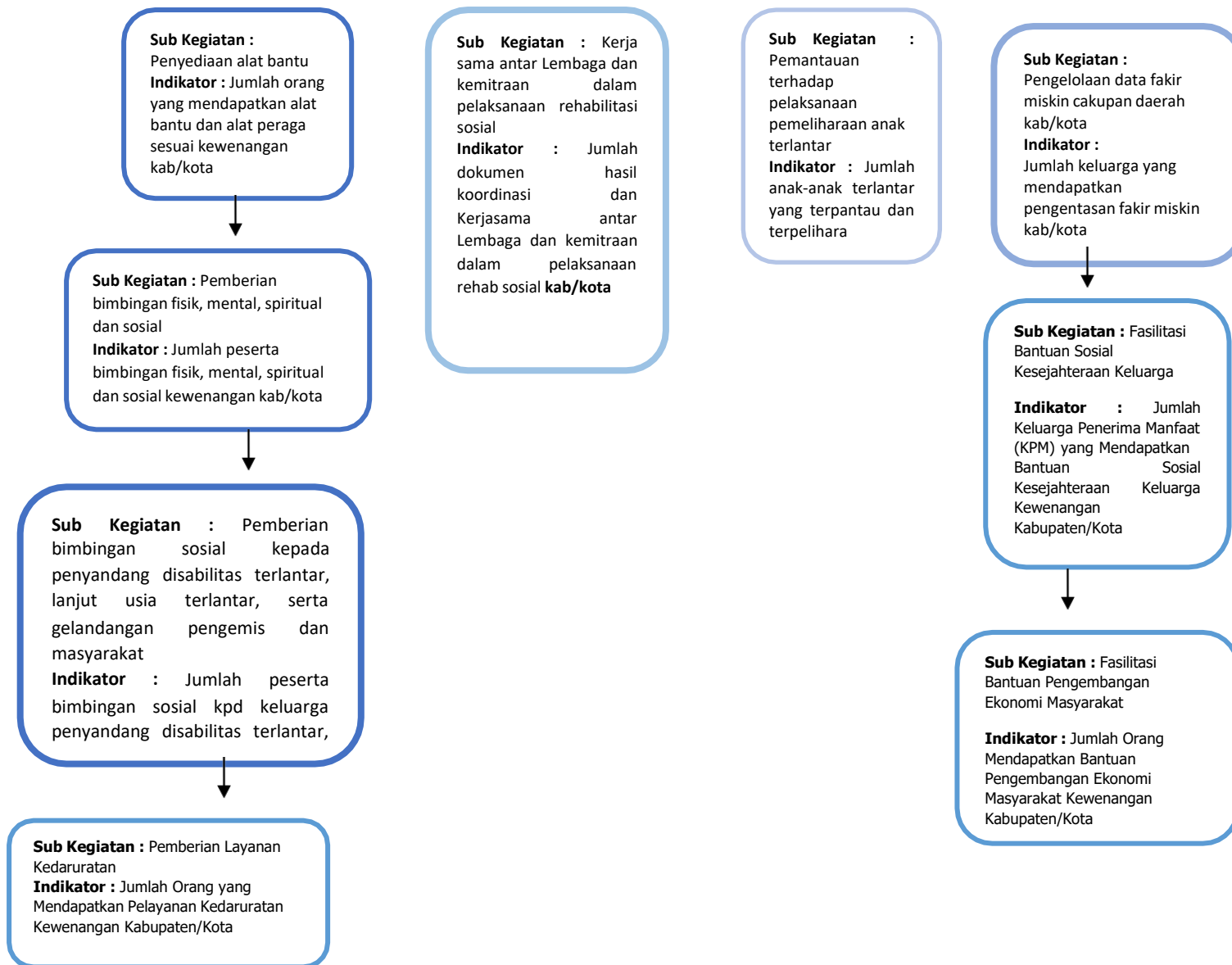
Sub Kegiatan : pemberian bimbingan fisik mnetal , spiritual dan sosial
Indikator : jumlah peserta bimbingan fisik mnetal , spiritual dan sosial kewenangan

Sub Kegiatan : Penjangkauan anak-anak terlantar
Indikator : Jumlah anak-anak terlantar

Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
Indikator : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Indikator : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah sesuai tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Nomor : 800/1365/35.09.315/ Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KAB JEMBER TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase yang Berdaya PSKS	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang Berdaya}}{\text{Jumlah PSKS Keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Menerima Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah PMKS Keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dirawat}}{\text{Jumlah Keseluruhan Taman Makam Pahlawan}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Penanganan Bencana	Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Penanganan Bencana
4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Program Tercapai Indikator yang	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Rutin yang Tercapai Indikatornya}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kegiatan Rutin}} \times 100\%$	Sekretariat	

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran perangkat daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80 %
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90.2 %
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %
4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Sosial Kabupaten Jember didukung dengan anggaran program rutin dan prioritas Tahun 2023 sebesar Rp. 60.979.145.376,- (enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh enam rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagaiberikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	≥ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	≥ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	≥ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	≥ 60 - 70	Baik
5.	CC	≥ 50 - 60	Cukup (memadai)
6.	C	≥ 30 - 50	Kurang
7.	D	≥ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negatif yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

B.1. ANALISA REALISASI KINERJA

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) tujuan, dan 4 (empat) sasaran, dan 5 (lima) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada Tahun 2023

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80 %	80 %	100%
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90.2 %	90 %	100%
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %	100 %	100 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jember rata rata mencapai 100 % dan masuk dalam kategori AA (sangat memuaskan). Dengan demikian maka secara umum Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)
1	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang berdaya	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2	Meningkatnya penanganan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PPKS	Prosentase PMKS yang menerima Bantuan kebutuhan dasar	90.1 %	90.1 %	90.2 %	90 %	90 %	90 %
3	Meningkatnya restorasi sosial	Persentase peningkatan pengelolaan taman makam pahlawan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi yang Harus Dicapai
pada Tahun 2023 berdasarkan Target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGA HPADA RENSTRA 2026	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80 %	80 %	100%
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yg Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90.3 %	90 %	100%
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	100 %	100 %

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Jember

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI NASIONAL	KET (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80 %	-	-
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90 %	-	-
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %	-	-
4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	-	-

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dari Tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial :

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS berdaya adalah PSKS yang paham akan tugas pokok dan fungsinya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 bahwa dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia yang kompeten untuk penyelenggara kesejahteraan sosial yang dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

PSKS membantu Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan istilah lain sebagai PILAR Dinas Sosial yang bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan bantuan dan pelayanan sosial pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Jember, antara lain :

- Melaporkan masalah-masalah sosial di masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Jember, agar supaya bisa tertangani untuk segera diberikan bantuan dan pelayanan sosial;
- Membantu Dinas Sosial Kabupaten Jember melaksanakan verval data/assessment pada calon penerima bantuan dengan tujuan bantuan yang diberikan tepat sasaran;
- Membantu pelaksanaan pendistribusian bantuan pada keluarga miskin, korban bencana/terdampak bencana di 31 Kecamatan Kabupaten Jember
- Membantu melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan, dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember.

- Melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Dinas Sosial kabupaten Jember/Dinas Sosial Provinsi, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan atau PSKS dalam penyelenggara kesejahteraan sosial. Kordinasi di laksanakan dalam bentuk saling memberikan informasi menyampaikan persepsi dan /atau membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan, dalam bentuk : pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan dan rujukan

Pada Tahun 2023 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Jember sejumlah 1.233 orang, terdiri dari :

1). PSM adalah Pekerja sosial masyarakat merupakan relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jumlah anggota PSM Jember sebanyak 371 orang, dengan tugas dan fungsinya sbb :

- mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial;
- membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;
- mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain;
- berperan aktif dalam program nasional; dan
- sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

2). Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, TAGANA ditetapkan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana, dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana.

Anggota TAGANA Jember sejumlah 87 orang, dengan tugas membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat maupun saat pasca bencana serta tugas –

tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

- 3). Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Selanjutnya disingkat TKSK adalah Seseorang yang diberi tugas fungsi dan kewenangan sosial oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan atau Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Untuk Membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sesuai Lingkup Wilayah Penugasan di Kecamatan.

TKSK Kabupaten Jember sejumlah 31 orang dengan tugas membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten /Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan yg meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Terkait pelaksanaan penyelenggara kesejahteraan sosial dalam pendampingan program, TKSK layak menerima imbalan sesuai dengan standar program yang di maksud.

- 4). Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Puskesmas Kabupaten Jember sejumlah 744 orang, dengan tugas dan tanggung jawab :

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat Daerah;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program / layanan sosial di Desa/Kelurahan melalui Sekretariat SLRT Kabupaten;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di Desa/Kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Desa/Kelurahan.

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial dengan maksimal, ini bisa dilihat dari target peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial pada Tahun 2023 sebesar 80 %, dan terealisasi sebesar 80 % , dan capaian sebesar 100 %, dengan sasaran pemberdayaan pada PSKS di Kabupaten Jember.

Output kegiatan adalah :

- 1). pemberian bimbingan teknis tentang tugas dan fungsi PSKS dalam membantu penanganan PMKS di Kabupaten Jember ;
- 2). pembinaan dan pendampingan terhadap LKS, dalam bentuk penerbitan rekomendasi perpanjangan/pendirian LKS dan juga pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada 67 Lembaga Kesejahteraan Sosial berupa paket sembako untuk kebutuhan pangan penghuni LKS.

- 3). Pemberdayaan dan pemberian bantuan pada veteran, pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pejuang perintis kemerdekaan

2). Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS :

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS, dengan sasaran keluarga fakir miskin, lansia miskin, disabilitas, gelandangan dan pengemis, anak yatim/piatu/yatim piatu/anak PMKS lainnya, dan kelompok rentan/korban bencana/masyarakat terdampak bencana.

Berdasarkan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah keseluruhan PMKS di Kabupaten Jember pada tahun 2023 sebanyak 1.012.200 orang, yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, yang antara lain terdiri dari pemenuhan jaminan kesehatan melalui (PBID/PBIJKN), (permakanan/paket sembako, alat kesehatan dan sandang) dan bantuan langsung tunai / BLT DBHCHT.

Selain pemberian bantuan kebutuhan dasar tersebut, bentuk Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS juga dilaksanakan di UPTD Liposos yang bertempat di Jalan Tawes Nomor 306 Jember. Liposos adalah lingkungan pondok sosial, merupakan tempat penampungan atau tempat tinggal sementara bagi para penghuni yang notabene latar belakang dari PMKS seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, serta pekerja seks komersial (PSK). Sejumlah gelandangan psikotik atau yang memiliki gangguan jiwa, rata-rata tidak mengetahui identitas maupun keluarga mereka, mereka pun berakhir sebagai penghuni tetap Liposos.

Sebelum menempati barak atau ruangan, calon penghuni mesti melewati proses pendataan. Petugas mengidentifikasi calon penghuni untuk menentukan kesuaian dengan jenis PMKS, proses administrasi, pengisian biodata dan mengambil foto untuk database. setelah itu, calon penghuni ditempatkan di barak yang sesuai kriteria masing-masing. Dinas Sosial Kabupaten Jember memberikan fasilitas makan tiga kali sehari, peralatan mandi, dan layanan kesehatan untuk seluruh penghuni Liposos, termasuk mereka yang bertahan di Liposos. Anggaran yang digunakan berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Jember.

Jumlah klien tetap Liposos adalah 66 (enam puluh enam) orang, dan perawatan yang dilakukan pada klien adalah :

- 1). layanan pemberian kebutuhan dasar : pemberian permakanan pada klien (tiga kali makan selama satu tahun) dan pemberian sandang/baju klien
- 2). layanan perawatan kesehatan : di Liposos juga tersedia obat-obatan dan tenaga perawat professional dengan tujuan agar kesehatan klien liposos tetap terpantau ;
- 3). layanan rujukan klien : apabila ada klien yang sakit petugas liposos segera mengirim/merujuk pada RS Soebandi/RSJ lawang

- 4). layanan penelusuran keluarga dan reunifikasi klien : proses penelusuran keluarga klien dan pengembalian klien ke daerah asal/kepada pihak keluarga dengan didasari oleh adanya asesment oleh petugas Liposos
- 5). layanan pemeriksaan psykis juga rutin dilaksanakan, dengan medatangkan dokter jiwa langsung ke Liposos.
- 6). layanan pemakaman klien ; selain perawatan kesehatan di Liposos juga memberikan bantuan pemakaman bagi klien yang meninggal, dari perawatan jenazah, proses pemakaman sampai proses tahlilan.

Agar pelayanan klien di UPT di Liposos dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin maka diperlukan alokasi tambahan anggaran untuk sarana prasarana liposos, penanganan klien dan operasional pendukung kegiatan pelayanan klien di UPT liposos.

Dinas Sosial Kabupaten Jember berusaha melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial dengan maksimal, ini bisa dilihat dari target peningkatan penanganan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS Tahun 2023 sebesar 90,2 % dengan realisasi sebesar 90 % dan capaian sebesar 100 %. Selain anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten, ada beberapa kegiatan penanganan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS yang bersumber dari APBN, antara lain :

- Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
- Bantuan Sosial PBIJKN adalah singkatan dari Bantuan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia di sektor kesehatan. Mereka yang terdaftar Bansos PBIJKN akan mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan diberikan kepada masyarakat kurang mampu/fakir miskin
- PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
- Bantuan kaki dan tangan palsu dari sentra mahatmiya bali untuk penyandang disabilitas dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 penerima kaki tangan palsu sejumlah 77 orang.

3). Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial :

Keberadaan Taman Makam Pahlawan (TMP) sangat diperhatikan oleh Pemkab Jember agar tetap terawat. Saat ini tercatat 15 TMP di Kabupaten Jember berada di 15 Kecamatan. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan merupakan salah satu kegiatan prioritas Dinas Sosial Kabupaten Jember, salah satu cara agar TMP tersebut tetap terawat dengan menempatkan petugas kebersihan pada masing-masing 15 TMP. Dan target peningkatan pengelolaan taman makam pahlawan pada Tahun 2023 sebesar 100 % , terealisasi 100 %, dengan capaian 100 %. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di TMP, focus utama ada di TMP Patrang dengan kegiatan seperti kerja bhakti, upacara hari besar, kegiatan renungan malam, tabur bunga, dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat.

4). Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Ukuran keberhasilan Sasaran ini diukur dengan cara menghitung % indikator program yang tercapai. Indikator program di Dinas sosial tahun 2023, yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target indikator 80 % realisasi 80 %, dan capaian 100 %
- Program Pemberdayaan Sosial target indikator 90.2 % realisasi 90 %, dan capaian 100 %
- Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana target indikator 90.2 % realisasi 90 %, dan capaian 100 %
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan target indikator 100 % realisasi 100 %, dan capaian 100 %

Sehingga rata rata % indikator program tahun 2023 adalah 100%

Dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan rutin oprasional kantor dan kegiatan prioritas bantuan dan pelayanan pada PMKS telah dikerjakan secara maksimal hingga tercapai indikatornya.

B.2. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023**

Sasaran/Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran1 Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial								
Indikator 1.1 Persentase PSKS yang Berdaya	100%	√						
Rata-Rata Capaian :	100%	√						
Sasaran 2 Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS								
Indikator 2.1 Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	100%	√						

Rata-Rata Capaian :	100%	√						
Sasaran 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial								
Indikator 3.1 : Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	√						
Rata-Rata Capaian :	100 %	√						
Sasaran 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah								
Indikator 4.1 : Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	√						
Rata-Rata Capaian :	100 %	√						

Dari Tabel diatas terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam kategori sangat memuaskan, yaitu mencapai nilai capaian rata-rata 100%.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial, kategori capaian dari indikator sasaran adalah **sangat memuaskan** , dan agar kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dengan hasil yang maksimal maka Dinas Sosial Kabupaten Jember :

- a. Menyusun agenda kerja proses perencanaan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan kegiatan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
- b. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur terutama di Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan kegiatan administrasi, assesment, pemberian bantuan, pelaksanaan kegiatan bimtek pilar, koordinasi, monitoring dan evaluasi.
- c. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan melalui kegiatan bimtek/pelatihan peningkatan SDM PSKS, dalam menjalankan tugas dan fungsinya membantu Dinas Sosial Kabupaten Jember menangani PMKS
- d. Lebih giat untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan stakeholder/OPD terkait dikarenakan kegiatan pemberdayaan pada PSKS juga melibatkan pilar, masyarakat dan OPD terkait
- e. Manajemen anggaran pada TW 1 s/d IV juga harus lebih dioptimalkan agar pada tahun yang akan datang realisasi anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS, kategori capaian dari indikator sasaran adalah **sangat memuaskan** , dan agar kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dengan hasil yang maksimal maka Dinas Sosial Kabupaten Jember :

- a. Menyusun agenda kerja proses perencanaan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan kegiatan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
- b. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur terutama di Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kebencanaan Sosial dan UPT Liposos dalam melaksanakan kegiatan administrasi, assesment, pemberian bantuan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.
- c. Lebih giat untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan stakeholder/OPD terkait dikarenakan kegiatan ini juga melibatkan pilar, masyarakat dan OPD terkait
- d. Manajemen anggaran pada TW I s/d IV juga harus lebih dioptimalkan agar pada tahun yang akan datang realisasi anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.
- e. Permasalahan data calon penerima bantuan masih belum akurat, maka perlu ditingkatkan pelaksanaan Verval DTKS dan assesment calon penerima bantuan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
- f. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ketrampilan bagi PMKS dengan tujuan untuk menumbuhkan kemandirian dan produktifitas PMKS agar bisa merubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik, berdaya dan berguna di tengah-tengah masyarakat tanpa harus bergantung pada Pemerintah untuk terus mendapatkan bantuan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial, kategori capaian dari indikator sasaran adalah **sangat memuaskan**, dan agar kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dengan hasil yang maksimal maka Dinas Sosial Kabupaten Jember :

- a. Menyusun agenda kerja proses perencanaan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan kegiatan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
- b. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur terutama di Bidang Pemberdayaan Sosial (yang ditugaskan di 15 TMP di Kabupaten Jember) dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kabupaten Jember
- c. Lebih giat untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan stakeholder/OPD terkait dikarenakan kegiatan ini juga melibatkan pilar, masyarakat dan OPD terkait
- d. Manajemen anggaran pada TW I s/d IV juga harus lebih dioptimalkan agar pada tahun yang akan datang realisasi anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.
- e. Pengajuan anggaran pada Bupati Jember karena anggaran pemeliharaan pada 15 TMP tersebut masih kurang memadai

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah, kategori capaian dari indikator sasaran adalah sangat memuaskan, dan agar kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dengan hasil yang maksimal maka Dinas Sosial Kabupaten Jember :

- a. Menyusun agenda kerja proses perencanaan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan kegiatan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
- b. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam melaksanakan kegiatan rutin maupun kegiatan pelayanan sosial dan bantuan sosial pada masyarakat/PMKS
- d. Manajemen anggaran pada TW I s/d IV juga harus lebih dioptimalkan agar pada tahun yang akan datang realisasi anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya

Dengan perbaikan tata laksana serta pemenuhan barbagai aspek pelayanan publik, Dinas Sosial berhasil mewujudkan capaian target sasaran yang optimal, serta mendapatkan penghargaan "Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023" dengan nilai A dan kategori "Pelayanan Prima", dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima antara lain :

Juara 1 (satu) Pimpinan Informatif, Juara 2 (dua) PPID Pelaksana Informatif dan Juara Favorit RTIK.




B.3. ANALISA PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jember pada Tahun 2023 didukung 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana table berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penanganan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PPKS


No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Rehabilitasi Sosial			
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan			
	Input : Jumlah Dana	Rp. 589.640.000	Rp. 581.752.980	98.7 %
	Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.850 orang	1813 orang	98 %
	Outcome : Tersalurkannya Bantuan Permakanan/Paket Sembako pada Lansia Miskin			
	<p style="text-align: center;">Foto Pemberian Bantuan Paket Sembako bagi Lansia Miskin</p> 			

Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu			
Input : Jumlah Dana	Rp.249.355.000	Rp.161.613.000	64.8%
Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 orang	68 orang	68 %
Outcome : Tersalurkannya Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan pada Lansia Miskin			
<p align="center">Foto Pemberian Bantuan Alat Kesehatan bagi Lansia Miskin</p> 			
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
Input : Jumlah Dana	Rp. 2.167.710.500	Rp. 1.898.001.930	87.6
Output : Jumlah Klien Liposos yang mendapatkan Bantuan dan Pelayanan Sosial	50 orang	66 orang	132 %
Outcome : Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Klien Liposos			
<p align="center">Foto Kegiatan Penanganan Klien UPTD Liposos</p> 			





	<p>Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</p>			
	<p>Input : Jumlah Dana</p>	<p>Rp. 864.668.000</p>	<p>Rp. 814.403.200</p>	<p>94 %</p>
	<p>Output : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan bantuan dan pelayanan sosial</p>	<p>2.770 orang</p>	<p>2.670 orang</p>	<p>96%</p>
	<p>Outcome : Peningkatan pemberian Bantuan dan Pelayanan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</p>			


	<p>Foto Kegiatan Pemberian Alat Kesehatan pada Disabilitas</p> 			
	<p>Foto Kegiatan Pemberian paket Sembako pada Anak Yatim Piatu</p> 			
	<p>Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan</p>			
	<p>Input : Jumlah Dana</p>	<p>Rp. 78.350.500</p>	<p>Rp. 20.455.000</p>	<p>26.1</p>
	<p>Output : Jumlah laporan kasus masalah sosial</p>	<p>141 kasus</p>	<p>141 kasus</p>	<p>100%</p>
	<p>Outcome : Terlaksananya Pelayanan Kedaruratan pada PMKS</p>			


<p style="text-align: center;">Foto Kegiatan Reaksi Cepat Penanganan PMKS oleh TRC</p> 			
<p>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p>			
<p>Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</p>			
<p>Input : Jumlah Dana</p>	<p>Rp. 1.675.462.000</p>	<p>Rp. 1.625.565.250</p>	<p>97 %</p>
<p>Output : Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar</p>	<p>2.000 orang</p>	<p>1.935 orang</p>	<p>96.75 %</p>
<p>Outcome : Peningkatan Pemberian Layanan dan Bantuan Sosial pada Fakir Miskin</p>			
<p style="text-align: center;">Foto Pemberian Bantuan Paket Sembako bagi Fakir Miskin</p> 			

Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			
Input : Jumlah Dana	Rp. 264.940.000	Rp. 233.635.000	88.2 %
Output : Jumlah LKSA yang mendapatkan bantuan permakanaan	67 LKSA	67 LKSA	100%
Outcome : Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial			
Foto Kegiatan Kunjungan ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) 			
2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar			
Sub Kegiatan Penjangkauan Anak – Anak Terlantar			
Input : Jumlah Dana	Rp. 254.642.500	Rp. 229.293.750	90 %
Output : Jumlah Anak-Anak Yatim Piatu yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar	650 anak	637 anak	98 %
Outcome : Peningkatan Penjangkauan Anak – Anak Terlantar			

<p style="text-align: center;">Foto Pemberian Bantuan Paket Sembako bagi Anak Yatim</p> 			
Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			
Input : Jumlah Dana	Rp. 218.920.000	Rp. 194.355.000	88.8 %
Output : Jumlah Anak/Bayi Terlantar yang mendapat	800 anak	783 anak	97.87 %
Outcome : Peningkatan Pemantauan Anak – Anak Terlantar			
<p style="text-align: center;">Foto Penyerahan Bantuan bagi Anak Terlantar</p> 			

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Input : Jumlah Dana	Rp. 906.632.000	Rp. 811.676.000	89.5 %
Output : Jumlah petugas yang melaksanakan verval data fakir miskin	992 orang	992 orang	100 %
Outcome : Peningkatan Kegiatan Verval Data Fakir Miskin			
<p style="text-align: center;">Foto Kegiatan Integritas Data PMKS di Kabupaten Jember</p> 			
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga			
Input : Jumlah Dana	Rp. 35.583.154.500	Rp. 31.900.634.849	89.7 %
Output : Jumlah Buruh Tani/Buruh Pabrik Rokok yang mendapatkan BLT DBHCHT	80.106 KPM	73.168 KPM	91 %
Outcome : Peningkatan Pemberian BLT bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			

	<p align="center">Foto Penyaluran BLT DBHCHT (Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)</p> 			
	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			
	Input : Jumlah Dana	Rp. 24.000.000	0	0
	<p>Output : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Keterangan : kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan digeser pada kegiatan lain, dikarenakan seharusnya kegiatan tersebut berbentuk pelatihan keterampilan dengan sasaran Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) akan tetapi pada rincian belanja Sub Kegiatan bukan anggaran Pelatihan Keterampilan sehingga tidak bisa dilaksanakan</p>	0	0	0
	Outcome : Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			
	3 Program Penanganan Bencana			
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
	Input : Jumlah Dana	Rp. 4.736.521.100	4.525.472.500	95.5%
	Output : Jumlah korban bencana/terdampak bencana yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar	5.445 orang	5.390 orang	99%

<p>Outcome : Peningkatan Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar dan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</p>			
<p>Foto Pemberian Bantuan Paket Sembako bagi Kelompok Rentan /Korban Bencana</p> 			

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Pemberdayaan Sosial			
	<p>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Input : Jumlah Dana Output : Jumlah PSKS yang membantupenanganan PMKS</p>	<p>Rp. 989.243.000 1.500 orang</p>	<p>Rp. 855.302.500 1.481 orang</p>	<p>86.5 % 98 %</p>
	<p>Outcome : Peningkatan Kemampuan PotensiPekerja Sosial Masyarakat</p>			
	<p>Foto Kegiatan Peningkatan Kapasitasbagi Pilar – Pilar Dinas Sosial Kabupaten Jember</p> 			

<p>Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah PSKS yang membantu penanganan PMKS</p> <p>Outcome : Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Rp. 762.476.000 1.500 orang</p>	<p>Rp. 576.804.000 1.481 orang</p>	<p>75.6 % 98 %</p>
<p>Foto Kegiatan Peringatan HUT LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia)</p> 			

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial

No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
<p>1 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</p>			
<p>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</p> <p>Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</p> <p>Outcome : Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, dan Kegiatan dalam Memperingati Hari Besar nasional (upacara, tabur bunga, renungan malam, kerja bhakti dll)</p>	<p>Rp. 339.170.088 15 TMP</p>	<p>Rp. 281.662.000 15 TMP</p>	<p>83 % 100 %</p>
<p>Foto Kegiatan Tabur Bunga Hari Besar Nasional di TMP Patrang Jember :</p> 			

Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Jember berjumlah 24 (dua puluh empat) orang ASN, dengan rincian 8 (delapan) pejabat struktural dan 16 (enam belas) pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial didukung anggaran sebesar Rp. 60.979.145.376,- (enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh enam rupiah) dan terserap sebesar Rp. 54.326.348.943,- (lima puluh empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) atau 89 %.

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan rata-rata capaian 100%.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 60.979.145.376,- (enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh enam rupiah), Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi (Belanja Pegawai + Barang dan Jasa) sebesar Rp. 59.383.688.376,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.595.457.000,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

D. PERMASALAHAN DAN RENCANA AKSI SELANJUTNYA

1. Data Calon Penerima Bantuan masih Belum Akurat
2. Kemandirian dan produktifitas PMKS perlu ditingkatkan
3. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan
Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaiansasaran pada Tahun 2024 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :
 1. Dilaksanakan Verval DTKS pada 31 Kecamatan di Kabupaten Jember.
 2. Bersinergi dengan Stakeholder/OPD terkait agar berperan dalam usaha pemberdayaan guna kemandirian PMKS
 3. Pembinaan dan optimalisasi peran / keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya kesejahteraan sosial

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
A	Program Pemberdayaan Sosial			
1.	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
-	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	989.243.000	855.302.500	86.5
-	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	762.476.000	576.804.000	75.6
B	Program Rehabilitasi Sosial			
1.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
-	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	589.640.000	581.752.980	98.7
-	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	249.355.000	161.613.000	64.8
-	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2.167.710.500	1.898.001.930	87.6
-	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	864.668.000	814.403.200	94.2

-	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	78.350.500	20.455.000	26.1
2.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
-	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.675.462.000	1.625.565.250	97
-	Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	264.940.000	233.635.000	88.2
C	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
1.	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar			
-	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak – Anak Terlantar	254.642.500	229.293.750	90
-	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	218.920.000	194.355.000	88.8
2.	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
-	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	906.632.000	811.676.000	89.5
-	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga	35.583.154.500	31.900.634.849	89.7
-	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	24.000.000	0	0
D	Program Penanganan Bencana			
1.	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
-	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	4.736.521.100	4.525.472.500	95.5
E	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			
1.	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan			
-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	339.170.088	281.662.000	83

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember pada Tahun 2023 sebesar Rp. 54.326.348.943,- atau 89 %. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada Tahun 2022 maka mengalami penurunan sebesar 4 % yaitu pada Tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 45.503.956.876,- terealisasi sebesar Rp. 42.576.947.690,- atau 93 %. Penurunan ini disebabkan karena ada beberapa sub kegiatan yang serapannya di bawah 80%.

Hal ini dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu : sub kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dengan kegiatan pelatihan bagi PRSE, kegiatan tersebut dialihkan/ digeser untuk kegiatan lainnya, sub kegiatan penyediaan alat kesehatan bagi lansia, terserap hanya 64 % dikarenakan jumlah kebutuhan alkes kursi roda lebih banyak di banding kaki 4, hearing aid dan kruck sehingga ada efisiensi anggaran untuk alkes tersebut, sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan hanya terserap 26 % dikarenakan anggaran SPPD luar daerah tidak diserap dikarenakan untuk pengiriman/rujukan klien menggunakan anggaran SPPD di Sekretariat, dan kendala lain adalah efisiensi masing-masing anggaran per sub kegiatan, dan anggaran lembur dan SPPD dalam daerah sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga (BLT DBHCHT).

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Jember. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember pada Tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember 2021 – 2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember pada tahun – tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran – sasaran pada tiap – tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari 4 indikator sasaran sejumlah 4 indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 54.326.348.943,- (89%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara pencapaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan pada masing-masing sasaran, adalah sebagai berikut :

Permasalahan pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial:

- 1) Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan pemberdayaan sosial
- 2) Kemampuan dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang perlu ditingkatkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial

Permasalahan pada sasaran Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- 1) Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Data calon penerima bantuan masih belum akurat
- 3) Belum terlaksananya kegiatan yang mendorong kemandirian dan produktifitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Permasalahan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Restorasi Sosial

- 1) Kemampuan dan kualitas SDM Non ASN penjaga 14 Taman Makam Pahlawan yang perlu ditingkatkan
- 2) Minimnya Anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan 14 TMP di Kabupaten Jember

Permasalahan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan baik itu rutin maupun program kegiatan prioritas yaitu bantuan dan pelayan sosial bagi PMKS;
- 2) Perencanaan kegiatan yang masih belum optimal khususnya untuk bantuan dan pelayanan sosial bagi PMKS.

kategori capaian dari indikator sasaran adalah sangat memuaskan , dan agar kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dengan hasil yang maksimal maka Dinas Sosial Kabupaten Jember :

- a. Mengadakan Bimtek/Pelatihan khusus bagi peningkatan SDM PSKS agar lebih optimal dalam membantu penanganan PMKS ;
- b. Mengadakan Bimtek bagi peningkatan SDM Karyawan ASN dan Non ASN Dinas Sosial Kabupaten Jember agar lebih optimal dan memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan sosial pada PMKS ;
- c. Peningkatan verivali dan verifikasi DTKS di 31 Kecamatan ;
- d. Peningkatan Assesmen calon penerima manfaat dengan turun langsung ke wilayah/door to door;
- e. Menyusun program kegiatan pelatihan ketrampilan bagi PMKS guna mewujudkan kemandirian PMKS
- e. Sinergi dengan Stakeholder/OPD terkait agar ikut berperan dalam usaha pemberdayaan guna kemandirian PMKS
- f. Pengajuan tambahan anggaran pemeliharaan 14 TMP di Kabupaten Jember

- g. Menyusun agenda kerja proses perencanaan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan kegiatan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV ; dan
- h. Manajemen anggaran pada TW I s/d IV (monitoring dan evaluasi) juga harus lebih dioptimalkan agar pada tahun yang akan datang realisasi anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap – tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi, dan penyusunan rencana kegiatan Tahun 2024.

JEMBER, JANUARI 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER



AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760507 199602 1 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
- 2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023**
- 3. RENCANA AKSI TAHUN 2023**
- 4. SK IKU TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS SOSIAL

JL. Tawes Nomor 306 Telp (0331) 487766 Jember

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

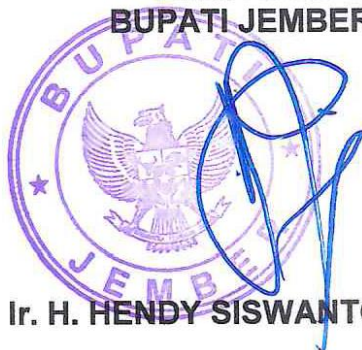
Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER**

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.



AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos
NIP. 19760507 199602 1 004

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80 %
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan bagi PMKS Sosial	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90,2 %
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%
4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.274.259.188,-	P-APBD
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.751.719.000,-	P-APBD
3. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 5.890.127.000,-	P-APBD
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 36.987.349.000,-	P-APBD dan DBHCHT
5. Program Penanganan Bencana	Rp. 4.736.521.100,-	P-APBD
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 339.170.008,-	P-APBD
Jumlah	Rp. 60.979.145.376,-	

Jember, 21 November 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER**

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.



AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos
NIP. 19760507 199602 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

MISI		TUJUAN RPJMD			INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD			INDIKATOR SASARAN			
Menuntaskan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Semua Wilayah		Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya			Persentase Penduduk Miskin	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya			Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Minimal			
TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	ANGGARAN (Rp).	
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya	Persentase Penurunan PMKS	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80%	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah PSKS yang Membantu Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada PMKS	1500 orang	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	1500 orang	989.243.000,-	
								Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	762.476.000,-	

		Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90.2 %	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	90,2%	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 orang	589.640.000,-
								Penyediaan Alat Bantu Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewangan Kabupaten/Kota	1000 orang	249.355.000,-
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	2.167.710.500,-
								Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penerima Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	462 orang	864.668.000,-

								Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	78.351.500,-
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000,- orang	1.675.462.000,-
								Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	67 Dokumen	264.960.000,-
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Skala yang Mmemperoleh Bnatuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	90,20%	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	254.642.500
								Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 orang	254.642.500,-
								Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	397.140 keluarga	906.632.000,-

								Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang Mendapat Bantuan Sosial Kesejahteraan	63.335 KPM	35.583.154.500,-
					Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat Bencana	90,20%	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	770 orang	3.489.250.000,-
		Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang Dirawat	14 TMP	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Tamakn Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	14 TMP	339.170.088,-
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Realisasi Anggaran	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	1 Dokumen	85.400.000,-
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	4.592.813.613,-

								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	75.194.500
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	231.547.600
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	119.932.300
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	1 Paket	320.290.000,-
								Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	93.247.607

								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	3.750.000,-
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400 Laporan	5.550.000
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	197.499.445,-
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yang disediakan	12 Laporan	4.159.758.000,-
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	181.765.500

								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	9 Unit	540.490.000
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	60.000.000
								Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	927.310.623

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/OUPUT	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berdaya	80 %	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	1.500 orang	TW II : 1.500 orang	
			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	8 lembaga	TW I : 1 lembaga TW II : 1 lembaga TW III : 3 lembaga TW IV : 3 lembaga	
Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang menerima bantuan kebutuhan dasar	90.2 %	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	1.000 orang	TW II : 300 orang TW III : 400 orang TW IV : 300 orang	
			Kegiatan Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	100 orang	TW II : 40 orang TW III : 60 orang	

				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	60 orang	TW I s/d IV : 60 orang	
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kab/kota	462 orang	TW I : 80 orang TW II : 100 orang TW III : 200 orang TW IV : 82 orang	
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	80 orang	TW I : 20 orang TW II : 20 orang TW III : 20 orang TW IV : 20 orang	
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000 orang	TW I : 6.250 orang TW II : 6.250 orang TW III : 6.250 orang TW IV : 6.250 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kab///kota	67 Dokumen	TW II : 67 Dokumen	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					
			Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota	100 orang	TW II: 100 orang	
				Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	1.000 orang	TW II : 500 orang TW III : 500 orang	
			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kab/kota	397.140 keluarga	TW I s/d IV : 397.140 keluarga	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	63.335 keluarga	TW IV : 63.335 keluarga	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kab/kota	770 orang	TW II : 300 orang TW III : 470 orang	
Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100 %	TW I s/d IV : 15 TMP	



DINAS SOSIAL

Jl. Tawes Nomor 306 Telp. (0331) 487766 Jember

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 800/1365 /35.09.315/2023
TENTANG**

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

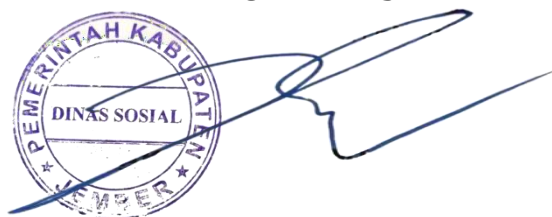
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER



AKHMAD HELMI LUOMAN, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760507 199602 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Sosial Kabupaten Jember
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan kesejahteraan sosial Rehabilitasi sosial, dan penyelenggaraan bantuan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
 2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KAB JEMBER TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang Berdaya}}{\text{Jumlah PSKS Keseluruhan}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Menerima Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah PMKS Keseluruhan}} \times 100 \%$	Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dirawat}}{\text{Jumlah Keseluruhan Taman Makam Pahlawan}} \times 100 \%$	Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Penanganan Bencana	Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Penanganan Bencana
4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Rutinyang Tercapai Indikatornya}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kegiatan Rutin}} \times 100 \%$	Sekretariat	27

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER



AKHMAD HELMI LUOMAN, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760507 199602 1 004

